

Pengaruh Kebijakan Pertanian Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Petani Kecil dalam Pembangunan Pertanian (Studi Literatur)

Dita Deviana Fadhilah¹, Sriwardany²

¹ Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis

² Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi

E-mail: ditadeviana01@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan pertanian memainkan peran penting dalam menentukan arah pembangunan pertanian, terutama bagi petani kecil yang sering menjadi tulang punggung perekonomian pedesaan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan subsidi pertanian dan kebijakan harga komoditas mempengaruhi produktivitas komoditi hasil pertanian dan pendapatan petani kecil, serta menilai dampak kebijakan ini terhadap stabilitas pendapatan petani. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa subsidi pertanian mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani ketika distribusinya tepat sasaran. Namun, adanya tantangan dalam penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran. Selain itu, kebijakan harga komoditas, seperti penetapan harga minimum, memberikan jaminan pendapatan yang lebih stabil bagi petani. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan, dengan pengawasan ketat untuk memastikan distribusi yang tepat dan dukungan terhadap infrastruktur pasar yang memadai.

Kata Kunci: Kebijakan, Subsidi, Petani Kecil, Pendapatan, Pembangunan

ABSTRACT

Agricultural policy plays an important role in determining the direction of agricultural development, especially for small farmers who are often the backbone of the Indonesian rural economy. The purpose of this study is to analyze how agricultural subsidy policies and commodity price policies affect the productivity of agricultural commodities and the income of small farmers, and to assess the impact of these policies on the stability of farmers' incomes. Through a qualitative approach, this study found that agricultural subsidies can increase farmer productivity and income when their distribution is on target. However, there are challenges in the distribution of subsidies that are not on target. In addition, commodity price policies, such as minimum price setting, provide a more stable income guarantee for farmers. The results of this study provide recommendations for policy makers to formulate more effective and equitable policies, with strict supervision to ensure proper distribution and support for adequate market infrastructure.

Keywords: Policy, Subsidy, Small Farmers, Income, Development

PENDAHULUAN

Sebagian besar negara-negara berkembang bergantung pada sektor pertanian sebagai inti ekonomi mereka. Konsekuensinya, kemajuan sektor lain sangat dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan pertanian negara (Sadoulet, 1995). Konsistensi dengan pernyataan tersebut diperkuat oleh temuan empiris yang menunjukkan bahwa keberhasilan sektor industri dan jasa sering kali bergantung pada kemajuan sektor pertanian, sebagaimana terjadi di sejumlah negara, terutama negara berkembang (EI-Said M, Lofgren, Robinson, 2001).

Banyak negara berfokus pada pembangunan pertanian karena hubungannya yang erat dengan kemiskinan di pedesaan. Ini karena peran pertanian yang signifikan dalam pembangunan

ekonomi nasional dan regional. Di negara-negara berkembang, fokus pembangunan pedesaan sering menekankan pengembangan program agropolitan sebagai bagian penting dari pembangunan. Agropolitan telah dianggap sebagai pendekatan penting untuk memecahkan masalah ekonomi seperti kemiskinan di pedesaan dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pedesaan yang bergantung pada industri pertanian (Douglass, 1981). Produksi pertanian, pekerjaan, sumber daya manusia, dan teknologi sering dikaitkan dengan daerah pedesaan di negara-negara berkembang. Faktor-faktor ini telah diidentifikasi sebagai penyebab kelemahan produk pertanian pedesaan dalam persaingan di pasar domestik dan internasional. Tujuan utama program agropolitan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan sektor pertanian dan pedesaan. Menggunakan pengembangan agropolitan diharapkan dapat menyelesaikan masalah sosial seperti lapangan kerja di pedesaan (Friedmann, 1985).

Kebijakan pertanian memainkan peran krusial dalam menentukan arah perkembangan sektor pertanian, khususnya bagi petani kecil yang sering kali menjadi tulang punggung perekonomian pedesaan. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, sektor pertanian bukan hanya menjadi penyedia pangan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber utama mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk. Namun, sering kali petani kecil menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap teknologi, modal, pasar, hingga perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Dalam konteks ini, kebijakan pertanian yang dirumuskan oleh pemerintah dapat menjadi pedang bermata dua: dapat mendorong kesejahteraan dan kemajuan, atau sebaliknya, memperburuk kondisi sosial ekonomi petani kecil.

Salah satu contoh kebijakan yang signifikan adalah subsidi pertanian. Subsidi ini, jika diterapkan dengan tepat, dapat membantu petani kecil untuk mendapatkan input pertanian seperti pupuk dan benih dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini tentunya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Namun, jika subsidi ini tidak tepat sasaran atau disertai dengan korupsi, dampaknya justru bisa merugikan. Selain subsidi, kebijakan terkait akses pasar juga penting. Fasilitasi pemerintah dalam hal infrastruktur pasar dan regulasi harga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi stabilitas harga produk pertanian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan petani kecil.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan pertanian mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi petani kecil. Studi ini penting mengingat mayoritas petani di Indonesia adalah petani kecil yang bergantung pada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan memahami dampak dari kebijakan-kebijakan ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

A. Teori Kesejahteraan

Terdapat dua dimensi kesejahteraan hidup, yaitu objektif dan subjektif. Dimensi objektif mencerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar yang dapat diamati secara langsung, seperti penghasilan, hunian yang layak, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Kesejahteraan subjektif dinilai melalui persepsi individu atas kebahagiaan dan kepuasan hidup yang mereka alami, seperti kebanggaan atas pencapaian keluarga, keberhasilan anak-anak, serta rasa syukur atas kondisi pekerjaan yang memadai (Norizan, 2003).

Myers et al. (2005) menyatakan bahwa kesejahteraan hidup merupakan suatu konsep yang kompleks dan sulit diukur, baik dari sisi objektif maupun subjektif, sehingga tidak mudah untuk merumuskan definisi yang jelas dan universal mengenai makna kesejahteraan hidup. Sebab, kesejahteraan hidup mencerminkan upaya individu dalam mencapai keselarasan fisik, mental, dan spiritual secara menyeluruh, yang menjadi dasar bagi terciptanya kualitas hidup yang bermakna di lingkungan sosialnya.

Teori kesejahteraan adalah cabang dari ekonomi yang mempelajari bagaimana alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan memengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi individu serta masyarakat. Kesejahteraan bisa didefinisikan sebagai kondisi di mana individu atau masyarakat menikmati kualitas hidup yang baik, yang mencakup kesejahteraan ekonomi, fisik, mental, dan sosial. Kesejahteraan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang utama: objektif dan subjektif.

Kesejahteraan objektif melibatkan aspek-aspek yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kondisi perumahan. Misalnya, tingkat pendapatan per kapita, angka harapan hidup, tingkat melek huruf, dan akses terhadap layanan kesehatan adalah indikator kesejahteraan objektif.

Sebaliknya, kesejahteraan subjektif berkaitan dengan persepsi individu mengenai kualitas hidup mereka sendiri, termasuk tingkat kepuasan dan kebahagiaan. Faktor-faktor seperti kepuasan dalam pekerjaan, hubungan keluarga, dan perasaan aman memainkan peran penting dalam kesejahteraan subjektif. Para ahli seperti Diener et al. (1999) telah meneliti kesejahteraan subjektif dan menemukan bahwa faktor-faktor psikologis dan emosional sangat berpengaruh terhadap bagaimana individu merasakan kualitas hidup mereka.

Pandangan Para Ahli

1. Amartya Sen: Sen (1999) dalam bukunya "Development as Freedom" mengemukakan bahwa kesejahteraan seharusnya diukur melalui "capabilities" atau kemampuan individu untuk melakukan berbagai kegiatan dan mencapai hasil yang mereka hargai. Menurut Sen, kesejahteraan tidak hanya tentang pendapatan atau kekayaan, tetapi juga tentang kebebasan untuk mengejar tujuan-tujuan penting dalam hidup, seperti pendidikan dan kesehatan.
2. John Rawls, dalam *A Theory of Justice* (1971), mengemukakan konsep *justice as fairness* yang terdiri dari dua prinsip pokok: kesetaraan dalam hak-hak dasar dan pengelolaan ketimpangan sosial-ekonomi secara adil demi menguntungkan pihak yang paling rentan dalam masyarakat.
3. Diener et al.: Diener et al. (1999) meneliti kesejahteraan subjektif dan menekankan pentingnya kebahagiaan dan kepuasan hidup sebagai indikator kesejahteraan. Mereka menemukan bahwa faktor-faktor psikologis seperti emosi positif, hubungan sosial yang kuat, dan pencapaian tujuan pribadi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan subjektif.

Teori kesejahteraan sangat berpengaruh dalam perumusan kebijakan publik, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan keamanan sosial. Pemerintah menggunakan indikator-indikator kesejahteraan objektif seperti PDB per kapita, indeks pembangunan manusia (IPM), dan

tingkat kemiskinan untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan. Selain itu, survei kebahagiaan dan kepuasan hidup digunakan untuk menangkap kesejahteraan subjektif masyarakat.

B. Kebijakan Pembangunan Pertanian

Kebijakan pembangunan pertanian merujuk pada serangkaian tindakan dan peraturan yang dirancang oleh pemerintah untuk mempromosikan pertumbuhan sektor pertanian, meningkatkan produktivitas, dan kesejahteraan petani. Pembangunan pertanian penting karena sektor ini merupakan sumber utama pendapatan dan pekerjaan bagi jutaan orang, terutama di negara berkembang. Sektor pertanian juga berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Komponen Kebijakan Pembangunan Pertanian

1. **Subsidi Pertanian:** Subsidi diberikan untuk mendukung petani dalam membeli input seperti benih, pupuk, dan pestisida. Subsidi juga bisa diberikan dalam bentuk harga minimum yang dijamin untuk produk pertanian tertentu.
2. **Infrastruktur:** Investasi dalam infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerugian pasca-panen.
3. **Penelitian dan Pengembangan (R&D):** Pengembangan varietas benih unggul, teknologi pertanian modern, dan praktik agronomi yang lebih baik dapat meningkatkan hasil panen dan keberlanjutan pertanian.
4. **Pelatihan dan Penyuluhan:** Pendidikan dan pelatihan bagi petani mengenai teknik pertanian modern, manajemen usaha tani, dan pemasaran produk dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan petani.
5. **Akses ke Pasar:** Kebijakan yang memfasilitasi akses petani ke pasar, termasuk pasar internasional, dapat meningkatkan harga yang diterima petani dan memperluas pangsa pasar.

Pandangan Para Ahli

1. **Schuld (1964):** Dalam bukunya "Transforming Traditional Agriculture," Schuld mengemukakan bahwa pertanian tradisional dapat ditransformasi menjadi pertanian modern melalui investasi dalam pendidikan, teknologi, dan infrastruktur.
2. **Hayami dan Ruttan (1985):** Mereka dalam "Agricultural Development: An International Perspective" menekankan pentingnya peran inovasi teknologi dan institusi dalam memacu pembangunan pertanian.
3. **Ellis (1993):** Dalam "Peasant Economics," Ellis menyoroti bahwa pembangunan pertanian harus mencakup aspek sosial dan ekonomi, serta harus didukung oleh kebijakan yang adil dan inklusif.

Studi Kasus

1. **Indonesia:** Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan pertanian melalui program seperti Program Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai (UPSUS PAJALE) yang bertujuan meningkatkan produksi pangan. Studi

menunjukkan bahwa kebijakan ini membantu meningkatkan produksi dan pendapatan petani.

2. India: Program seperti Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) yang juga mencakup komponen pembangunan pertanian, telah membantu mengurangi kemiskinan di pedesaan dan meningkatkan produktivitas pertanian.

C. Kebijakan Bantuan Langsung

Kebijakan bantuan langsung adalah program pemerintah yang memberikan bantuan tunai atau bantuan barang langsung kepada individu atau rumah tangga yang membutuhkan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan bantuan segera kepada kelompok yang rentan.

Jenis Bantuan Langsung

1. Bantuan Tunai Langsung (BLT): Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai kepada individu atau rumah tangga miskin. Contoh program BLT di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu bentuk bantuan sosial bersyarat yang menyalurkan dana tunai kepada rumah tangga miskin yang memenuhi kriteria dan kewajiban tertentu.
2. Bantuan Pangan: Program bantuan pangan memberikan bantuan berupa makanan atau voucher makanan kepada keluarga miskin. Contoh program ini adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Indonesia yang menyediakan bantuan dalam bentuk kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.
3. Bantuan Pendidikan dan Kesehatan: Program seperti beasiswa pendidikan dan bantuan biaya kesehatan ditujukan untuk membantu keluarga miskin mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.

Pandangan Para Ahli

1. Amartya Sen: Sen (1981) dalam "Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation" menekankan pentingnya memastikan akses individu terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bantuan langsung adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa kelompok rentan memiliki akses ke sumber daya ini.
2. Joseph Stiglitz: Dalam bukunya "Globalization and Its Discontents" (2002), Stiglitz berpendapat bahwa bantuan langsung dapat membantu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Namun, ia juga menekankan bahwa program-program tersebut harus didesain dengan baik untuk menghindari ketergantungan.
3. Esther Duflo dan Abhijit Banerjee: Dalam "Poor Economics" (2011), Duflo dan Banerjee menunjukkan bahwa bantuan langsung, jika diterapkan dengan tepat, dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Mereka menekankan pentingnya desain program yang responsif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat miskin.

Studi Kasus

1. Brazil: Program Bolsa Família di Brasil merupakan inisiatif bantuan sosial bersyarat yang memberikan transfer dana tunai kepada keluarga miskin, dengan syarat anak-anak dalam keluarga tersebut harus bersekolah dan mendapatkan imunisasi. Program ini terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem serta meningkatkan angka partisipasi pendidikan di negara tersebut.
2. Indonesia: Di Indonesia, dua contoh kebijakan bantuan langsung tunai yang menargetkan rumah tangga miskin adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Tujuan utama dari kedua program ini adalah untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat rentan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan sosial-ekonomi para penerima manfaat.

Evaluasi dan Tantangan

1. Desain dan Implementasi: Desain program yang baik harus mempertimbangkan kebutuhan dan konteks lokal. Implementasi yang efektif memerlukan sistem pengelolaan yang baik, termasuk verifikasi penerima, distribusi bantuan, dan monitoring serta evaluasi program.
2. Efisiensi dan Keberlanjutan: Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan keberlanjutan program adalah tantangan besar. Program bantuan langsung harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa menciptakan ketergantungan.
3. Integrasi dengan Kebijakan Lain: Bantuan langsung sebaiknya diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, untuk menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Teori kesejahteraan, kebijakan pembangunan pertanian, dan kebijakan bantuan langsung adalah konsep dan praktik yang saling terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani kecil dan rumah tangga miskin. Pendekatan multidimensi dan inklusif yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan psikologis sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Para ahli seperti Amartya Sen, John Rawls, dan Esther Duflo telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengembangkan konsep-konsep ini, sementara studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda.

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pengaruh kebijakan pertanian terhadap kehidupan sosial ekonomi petani kecil. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap kompleksitas dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari petani serta bagaimana mereka merespons kebijakan yang diterapkan.

Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kaya dan mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari teori kesejahteraan dan konsep kesejahteraan petani. Teori kesejahteraan mencakup kesejahteraan objektif dan subjektif, yang dijabarkan lebih lanjut melalui indikator-indikator seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan perasaan puas serta bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka ini kemudian diaplikasikan dalam konteks kebijakan pertanian, yang meliputi kebijakan subsidi, infrastruktur, penelitian dan pengembangan, serta pelatihan dan penyuluhan. Fokus utama adalah bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut memengaruhi kesejahteraan petani kecil dalam berbagai aspek kehidupannya.

C. Ukuran Kesejahteraan Petani

Untuk mengukur kesejahteraan petani, digunakan beberapa indikator utama yang meliputi:

1. Pendapatan: Penghasilan dari kegiatan pertanian dan non-pertanian.
2. Kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan, status kesehatan keluarga.
3. Pendidikan: Akses dan tingkat pendidikan anak-anak petani.
4. Perumahan: Kondisi tempat tinggal dan akses terhadap fasilitas dasar.
5. Kepuasan Hidup: Persepsi petani mengenai kebahagiaan dan kepuasan hidup mereka, yang diukur melalui wawancara mendalam.
6. Keamanan Pangan: Kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder:

1. Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussions/FGD*), dan observasi partisipatif. Informan utama adalah petani kecil yang terlibat langsung dalam kegiatan pertanian dan terkena dampak kebijakan pertanian.
2. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan penelitian sebelumnya, publikasi jurnal, buku, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam beberapa dekade terakhir, kebijakan pertanian di Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Kebijakan-kebijakan ini mencakup berbagai aspek seperti subsidi pupuk, program bantuan langsung tunai, pembangunan infrastruktur, dan harga pembelian pemerintah (HPP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut telah memengaruhi kehidupan sosial ekonomi petani kecil di Indonesia.

A. Dampak Subsidi Pupuk Terhadap Pendapatan Dan Produktivitas

Subsidi pupuk adalah salah satu kebijakan yang paling berdampak dalam sektor pertanian. Menurut data dari Kementerian Pertanian (2021), subsidi pupuk diberikan kepada petani kecil untuk meringankan beban biaya produksi. Penelitian lapangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur

menunjukkan bahwa subsidi pupuk telah berhasil mengurangi biaya produksi hingga 40%, yang secara signifikan meningkatkan margin keuntungan petani.

Studi oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2021) menunjukkan bahwa produktivitas padi di daerah yang menerima subsidi pupuk meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan daerah yang tidak menerima subsidi. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi pupuk tidak hanya mengurangi biaya produksi tetapi juga meningkatkan hasil panen.

Peningkatan produktivitas yang diakibatkan oleh subsidi pupuk berdampak positif pada pendapatan petani kecil. Dengan biaya produksi yang lebih rendah dan hasil panen yang lebih tinggi, petani dapat menjual produk mereka dengan keuntungan yang lebih besar. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa distribusi subsidi pupuk masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidaktepatan sasaran dan penyelewengan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

Produktivitas tanaman padi sangat dipengaruhi oleh besarnya penggunaan sarana produksi (saprodi) yang dialokasikan ke lahan pertanian. Berdasarkan data BPS (2019), saprodi menyumbang sekitar 18% dari total biaya usaha tani padi sawah, dengan proporsi 9,43% digunakan khusus untuk pembelian pupuk. Sementara itu, pada budidaya padi ladang, komponen saprodi mencakup 16,94% dari biaya total, di mana 8,4% di antaranya dialokasikan untuk pupuk. Tingginya kebutuhan pupuk dan beban biaya yang ditanggung petani, diperparah oleh melonjaknya harga pupuk kimia akibat ketergantungan pada bahan baku impor, memperlihatkan bahwa peran pupuk bersubsidi masih sangat krusial dalam mendukung kelangsungan usaha tani padi.

Pupuk bersubsidi memegang peranan strategis dalam mendukung sektor pertanian nasional. Menurut Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Ali Jamil, keberadaan pupuk bersubsidi bertujuan untuk menyediakan pupuk dengan harga yang terjangkau sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di seluruh wilayah Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa mutu pupuk bersubsidi tetap terjaga karena telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Meskipun demikian, distribusinya masih terbatas, sehingga diperlukan pemanfaatan yang optimal oleh petani di lapangan agar hasil pertanian tetap produktif.

Pengaruh positif pupuk bersubsidi terhadap peningkatan produktivitas padi terlihat jelas pada tahun 2018, ketika alokasi subsidi pupuk mencapai 9,29 juta ton—jumlah tertinggi sejak tahun 2014—dengan total anggaran sebesar Rp31,20 triliun. Kondisi tersebut berkontribusi pada peningkatan produktivitas padi nasional hingga 5,18 ton per hektar. Temuan ini sejalan dengan analisis dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP, 2020) yang menyatakan bahwa setiap kenaikan alokasi subsidi pupuk sebesar 14,18% per tahun berpotensi mendorong produktivitas padi meningkat sebesar 1,31% per tahun.

B. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Petani

Program BLT seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah diluncurkan oleh pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin, termasuk petani kecil. Menurut Kementerian Sosial (2021), program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan nutrisi yang lebih baik. Data dari Kementerian Sosial (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 70% penerima PKH adalah rumah tangga petani kecil. Studi oleh Rahmawati (2020) mengungkapkan bahwa penerima PKH mengalami peningkatan pendapatan

rumah tangga sebesar 10-15%. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga meningkat, dengan 80% anak-anak penerima PKH yang sebelumnya putus sekolah kini kembali bersekolah.

Program BLT memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan petani kecil. Peningkatan pendapatan dari bantuan tunai memungkinkan petani untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara syarat-syarat program PKH (seperti keharusan anak bersekolah) membantu meningkatkan kualitas hidup jangka panjang. Meskipun demikian, efektivitas program ini sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan, termasuk keakuratan data penerima dan distribusi bantuan yang tepat waktu.

C. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Dan Stabilitas Pendapatan Petani

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah kebijakan yang menetapkan harga minimum untuk komoditas tertentu seperti padi, jagung, dan kedelai. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani dari fluktuasi harga pasar yang merugikan. Menurut laporan dari Badan Ketahanan Pangan (2021), HPP untuk padi ditetapkan pada Rp4.200 per kilogram, yang lebih tinggi dari harga pasar pada musim panen raya. Studi oleh Sutopo (2021) menunjukkan bahwa petani yang menjual padi melalui skema HPP mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 20% dibandingkan dengan petani yang menjual di pasar bebas.

HPP memberikan jaminan pendapatan yang lebih stabil bagi petani kecil. Dengan adanya harga minimum yang dijamin, petani tidak perlu khawatir akan kerugian besar saat harga pasar turun drastis. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua petani dapat mengakses skema HPP, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau tidak memiliki akses informasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas jangkauan HPP dan memastikan seluruh petani kecil dapat merasakan manfaatnya.

D. Pembangunan Infrastruktur Pertanian Dan Peningkatan Akses Pasar

Pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan akses pasar bagi petani kecil. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2021) menunjukkan bahwa proyek pembangunan irigasi di Nusa Tenggara Barat meningkatkan luas lahan irigasi sebesar 25%. Studi oleh Suropto dan Nugroho (2019) menunjukkan bahwa petani yang memiliki akses ke irigasi yang baik mengalami peningkatan produktivitas hingga 30%. Selain itu, pembangunan jalan desa di Sumatera Barat mengurangi biaya transportasi hasil pertanian sebesar 20%, meningkatkan keuntungan petani.

Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung kegiatan pertanian. Irigasi yang baik memastikan pasokan air yang stabil, yang sangat penting untuk tanaman pangan. Jalan yang baik memudahkan akses petani ke pasar, sehingga mereka dapat menjual hasil panen mereka dengan harga yang lebih baik. Penelitian ini menemukan bahwa investasi dalam infrastruktur pertanian berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani kecil. Namun, perawatan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut juga penting untuk memastikan manfaat jangka panjang.

E. Akses Terhadap Pendidikan Dan Kesehatan

Kebijakan pertanian juga mempengaruhi akses petani kecil terhadap pendidikan dan kesehatan. Program seperti PKH dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) telah membantu meningkatkan akses ini. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021), partisipasi sekolah di kalangan anak-anak petani penerima PKH meningkat sebesar 20%. Data dari BPJS Kesehatan (2021) menunjukkan bahwa 85% petani kecil yang terdaftar dalam JKN mengakses layanan kesehatan secara rutin, yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan keluarga petani.

Akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan merupakan indikator penting dari kesejahteraan sosial. Anak-anak yang berpendidikan lebih baik memiliki peluang untuk keluar dari siklus kemiskinan, sementara akses kesehatan yang lebih baik meningkatkan produktivitas kerja petani. Kebijakan pemerintah yang fokus pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan telah menunjukkan hasil yang positif, tetapi tantangan seperti aksesibilitas di daerah terpencil masih perlu diatasi.

F. Keamanan Pangan Dan Ketahanan Pangan Keluarga

Keamanan pangan adalah salah satu aspek kunci dari kesejahteraan petani. Kebijakan pertanian yang baik dapat meningkatkan produksi pangan dan memastikan ketersediaan pangan bagi keluarga petani. Menurut data Kementerian Pertanian (2021), produksi padi nasional meningkat sebesar 10% setelah penerapan program subsidi pupuk dan benih unggul. Studi oleh CIFOR (2007) menunjukkan bahwa petani yang mendapatkan akses terhadap teknologi pertanian modern dan input berkualitas mengalami peningkatan produksi hingga 25%.

Peningkatan produksi pangan memastikan bahwa petani memiliki cukup pangan untuk kebutuhan keluarga mereka dan dapat menjual kelebihan hasil panen untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Kebijakan yang mendukung akses terhadap input pertanian berkualitas dan teknologi modern sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut berhasil meningkatkan produksi dan keamanan pangan di banyak daerah, tetapi distribusi yang merata dan akses terhadap teknologi masih perlu ditingkatkan.

G. Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pertanian

Meskipun banyak kebijakan yang berdampak positif, masih ada tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Tantangan ini termasuk ketidaktepatan sasaran, penyelewengan dana, dan kurangnya akses informasi di kalangan petani kecil. Laporan dari Ombudsman Republik Indonesia (2020) mengidentifikasi beberapa kasus penyelewengan dalam distribusi subsidi pupuk dan bantuan langsung tunai. Studi oleh Iskandar (2019) menunjukkan bahwa 25% petani di daerah terpencil tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang kebijakan pertanian yang tersedia.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu memastikan bahwa informasi kebijakan sampai ke seluruh petani, termasuk di daerah terpencil. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

H. Kebijakan Subsidi Pupuk

Berdasarkan data Nota Keuangan APBN 2020, subsidi pupuk tercatat sebagai komponen terbesar dalam kategori subsidi non-energi. Selama periode 2015–2018, rata-rata kontribusi subsidi pupuk mencapai 45,4 persen dari total subsidi non-energi. Sepanjang tahun 2015 hingga 2019, terjadi peningkatan rata-rata realisasi subsidi pupuk sebesar 4,3 persen per tahun, dari Rp31.316,2 miliar pada 2015 menjadi Rp37.101,6 miliar sesuai proyeksi APBN 2019. Angka ini termasuk alokasi untuk menutup kekurangan pembayaran dari tahun-tahun sebelumnya. Pada APBN 2020, pemerintah menganggarkan Rp26.627,4 miliar untuk subsidi pupuk dengan target penyaluran sebanyak 7,95 juta ton. Jumlah tersebut lebih rendah Rp10.474,2 miliar dibandingkan proyeksi anggaran tahun sebelumnya yang sebesar Rp37.101,6 miliar, yang sebagian besar juga digunakan untuk membayar kekurangan dari periode sebelumnya.

Sejak tahun 2017, pemerintah mulai mengimplementasikan sistem distribusi pupuk bersubsidi berbasis Kartu Tani secara bertahap. Langkah ini disertai dengan kegiatan penyuluhan dan edukasi agar dapat diterapkan secara luas di berbagai wilayah. Tahap awal penerapan dilakukan di lima provinsi Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Yogyakarta. Pada tahun berikutnya, wilayah implementasi diperluas ke sepuluh provinsi tambahan seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, dan NTB. Pemerintah menargetkan agar mekanisme distribusi ini dapat berlaku secara nasional pada tahun 2020. Di sisi lain, sistem e-RDKK juga terus dikembangkan guna memperkuat proses verifikasi dan akurasi data penerima manfaat, sehingga penyaluran pupuk dapat berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran.

SUBSIDI, 2014 - 2020 (triliun rupiah)							
Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN	APBN
Subsidi	392.0	186.0	174.2	166.4	216.9	224.3	187.6
i. Subsidi Energi	341.8	119.1	106.8	97.6	153.5	160.0	125.3
- Subsidi BBM	240.0	60.8	43.7	47.0	97.0	100.6	70.6
- Subsidi Listrik	101.8	58.3	63.1	50.6	56.5	59.3	54.8
ii. Subsidi Non Energi	50.2	66.9	67.4	68.8	63.4	64.3	62.3
- Subsidi Pangan	18.2	21.8	22.1	19.5	-	-	-
- Subsidi Pupuk	21.0	31.3	26.9	28.8	33.6	29.5	26.6
- Subsidi Benih	0.3	0.1	0.4	0.8	-	-	-
- PSO	2.1	3.3	3.7	4.3	4.2	6.8	4.9
- Subsidi Kredit Prog	2.8	1.9	5.1	6.1	15.0	16.7	18.5
- Subsidi Pajak	5.8	8.5	9.3	9.2	10.5	11.4	12.2

Sumber: Nota Keuangan dan APBN, Kementerian Keuangan 2020

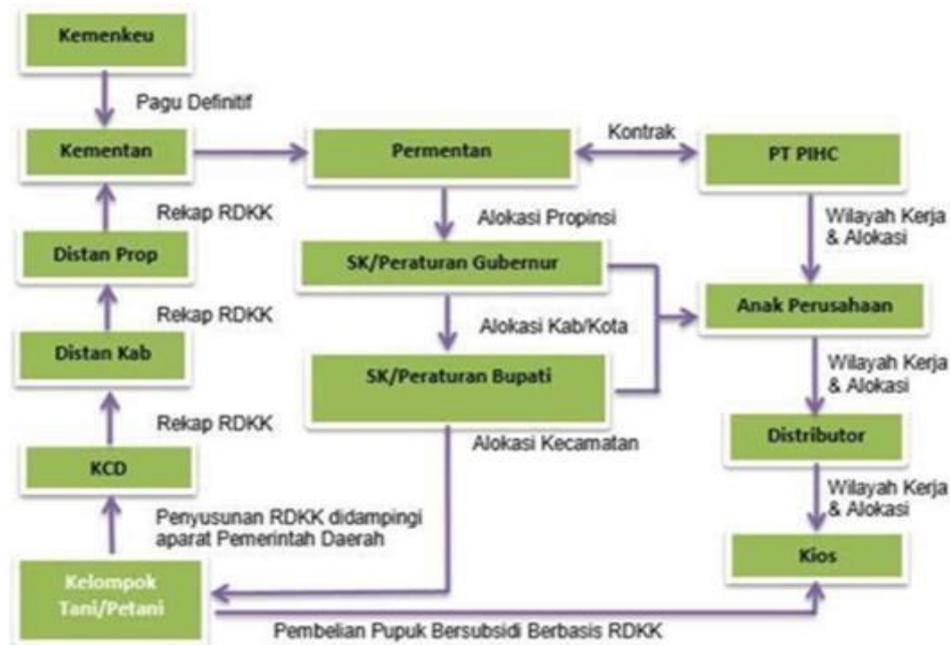
I. Penyaluran Subsidi Pupuk

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan ketepatan distribusi pupuk bersubsidi di tingkat daerah, diperlukan peran strategis dari jaringan distributor dan kios resmi. Kedua entitas ini berfungsi sebagai ujung tombak dalam menyalurkan pupuk kepada petani penerima manfaat yang telah terdaftar dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sementara itu, produsen pupuk diwajibkan untuk menyediakan stok minimal yang mencukupi kebutuhan selama dua minggu sebagai bentuk antisipasi terhadap fluktuasi permintaan, terutama menjelang musim tanam. Pengaturan terkait tata kelola distribusi ini telah diatur dalam regulasi yang relevan, antara lain Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017, yang menjadi landasan hukum dalam implementasi program subsidi pupuk secara nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan. Pertama, pembenahan data petani penerima pupuk bersubsidi dilakukan agar terhindar dari duplikasi, dengan menyelaraskan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor pertanian, terutama tenaga penyuluh, terus dilakukan melalui program pelatihan dan penguatan kapasitas kelembagaan oleh kementerian terkait. Ketiga, mekanisme distribusi pupuk bersubsidi telah diarahkan untuk berbasis Kartu Tani secara nasional, guna memastikan ketepatan sasaran penerima melalui sistem verifikasi individu (by name by address). Keempat, peninjauan kembali terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi menjadi penting untuk dilakukan, mengingat regulasi tersebut belum diperbarui sejak 2012, sementara dinamika ekonomi dan biaya produksi terus berubah. Untuk menjamin ketersediaan pupuk subsidi hingga ke tingkat pengecer (lini IV), Kementerian Pertanian juga mewajibkan anak perusahaan di bawah Pupuk Indonesia Grup untuk berperan aktif dalam distribusi. Seluruh tahapan distribusi diwajibkan mematuhi enam prinsip dasar, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu, yang dikenal sebagai prinsip 6T.

Alur Penyaluran Subsidi Pupuk



Sumber: KPK, Direktorat Penelitian dan Pengembangan 2017

Penerapan prinsip 6T juga sejalan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mendorong Kementerian Pertanian untuk merancang mekanisme distribusi pupuk bersubsidi yang langsung menyasar petani sebagai penerima manfaat. Selain itu, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Keuangan diminta untuk menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) tunggal sebagai dasar evaluasi dan pembayaran subsidi. Di sisi lain, PT Pupuk Indonesia didorong untuk memperkuat fungsi

pengawasan dan pengendalian dalam proses pengadaan serta distribusi pupuk, khususnya pada level anak perusahaan, guna menjamin akuntabilitas dan efektivitas program.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pertanian di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi petani kecil. Kebijakan seperti subsidi pupuk, program bantuan langsung tunai, harga pembelian pemerintah, dan pembangunan infrastruktur pertanian berkontribusi pada peningkatan pendapatan, produktivitas, akses pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan subjektif petani. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

REFERENSI

- Anggraeni, D., & Syafrudin, M. (2019). "Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Produksi Padi di Indonesia". *Jurnal Agro Ekonomi*, 30(2), 155-172.
- A Holistic Model for Treatment Planning". *Journal of Counseling & Development*, 78(3), 251-266.
- CIFOR. (2007). *Nested Spheres of Poverty: A Study on the Influence of Various Environmental and Social Factors on Well-being*. Bogor: CIFOR.
- Kementerian Sosial. (2021). *Laporan Program Keluarga Harapan (PKH)*.
- Kementerian Pertanian Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Kementerian Pertanian*. Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Pertanian Indonesia*.
- Norizan, M. (2003). *Konsep Kesejahteraan Hidup*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
- Myers, J. E., Sweeney, T. J., & Witmer, J. M. (2005). "The Wheel of Wellness Counseling for Wellness: Rahmawati, S. (2020). "Analisis Efektivitas Program Koperasi Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani". *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 7(2), 99-112.
- Sutopo, A., et al. (2021). "Pengaruh Kebijakan Harga terhadap Pendapatan Petani Padi di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Pembangunan*, 21(1), 45-58.
- Santoso, P., & Maulana, A. (2020). "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 45-58. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Laporan Pembangunan Infrastruktur*.
- Siregar, H. (2015). *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suswono. (2017). *Kebijakan Pertanian dan Kesejahteraan Petani*. Bogor: IPB Press.
- Suripto, E., & Nugroho, E. (2019). *Transformasi Pertanian di Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Widodo, H. (2019). "Subsidi Pertanian dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pangan Nasional". *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Pembangunan*, 20(2), 123-137.